

GAMBARAN PERENCANAAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI PUSKESMAS SIOMPU KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2015

Yusliati¹ La Dupai² Lisnawaty³

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo

Yusliati62@yahoo.com¹ ladupai1954@gmail.com² lisnaradhiyah@gmail.com³

ABSTRAK

Komponen penting dalam mendukung salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan adalah dengan pengadaan alat kesehatan. Pada perencanaan pengadaan alat kesehatan, di Puskesmas sering mengalami keterlambatan pengadaan serta pengadaan alat kesehatan belum terealisasi dengan baik sehingga dalam memberikan pelayanan pasien di Puskesmas menjadi kurang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat informasi lebih mendalam tentang gambaran perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015 ditinjau dari sumber daya manusia, saran dan prasarana, biaya/dana, metode, serta permintaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 2 orang informan kunci dan 3 orang informan biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu berdasarkan sumber daya manusia yang ada, kelengkapan sarana dan prasarana, biaya yang dialokasikan tidak cukup, tidak adanya metode atau pedoman dalam penyusunan perencanaan, pengadaan alat berdasarkan kebutuhan alat di Puskesmas serta di sesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan pertahunnya, serta menentukan jumlah permintaan alat dengan mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan anggaran yang tersedia.

Kata kunci: *Perencanaan, Alat kesehatan, Puskesmas*

OVERVIEW OF MEDICAL DEVICES PROCUREMENT PLANNING IN SIOMPU LOCAL GOVERNMENT CLINIC SOUTH BUTON DISTRICT IN 2015

ABSTRACT

An important component in supporting one of effort to improve health services is the procurement of medical devices. In planning of medical devices procurement in Local Government Clinic are often experiencing delays and it has not been realized well so that in providing patient care to be less effective and efficient. This study aims to gain more in-depth information about the overview of medical devices procurement planning in Siompu Local Government Clinic South Buton District in 2015 in the review of human resources, facilities and infrastructure, cost/funding, methods, and demand. The type of study was qualitative with descriptive approach. Informants in this study amounted to 5 people, consisting of 2 key informants and 3 ordinary informants. The results showed that the planning of medical devices procurement in Siompu Local Government Clinic based human resources, completeness of facilities and infrastructure, the costs allocated are not sufficient, no methods or guidelines for the preparation of planning, procurement of health devices based on the need for health devices in Local Government Clinic adjusted with budget which allocated annually, as well as determine the amount of demand of health devices by identifying needs based on available budget.

Keywords: *Planning, Medical Devices, Local Government Clinic*

PENDAHULUAN

Pengadaan alat kesehatan merupakan komponen penting dalam mendukung salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Tenaga Kesehatan menjamin ketersediaan alat kesehatan maka ketersediaan peralatan oleh pihak Pusat Kesehatan Masyarakat ini akan sangat mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan, termasuk kepuasan terhadap pasien. Oleh karena itu, peralatan haruslah lengkap serta kondisi maupun fungsi dari sarana fisik alat kesehatan tersebut harus dalam keadaan baik dan dapat mendukung pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan manajemen yang baik, yaitu pada bagian perencanaan mulai dari sumber daya Manusia, sarana dan Prasarana, biaya/dana, dan permintaan pengadaan alat kesehatan¹.

Alat kesehatan merupakan salah satu aspek yang mendukung terselenggaranya upaya pencegahan penyakit (*preventif*) dan penyembuhan penyakit (*kuratif*). Tidak tersedianya peralatan kesehatan maka akan mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada pasal 98 dan 104 menyebutkan bahwa pengelolaan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat serta pengamanan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh pengguna alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan. Oleh karena itu, kondisi maupun fungsi dari sarana fisik alat kesehatan tersebut harus dalam keadaan baik dan mendukung pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi terkait mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya/dana, dan permintaan, pengadaan alat kesehatan¹.

Upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan maka Puskesmas harus melakukan segala hal secara terperinci dan sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada². Salah satu hal yang harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur tetap yaitu hal yang berhubungan dengan perencanaan pengadaan kebutuhan alat kesehatan. Perencanaan pengadaan kebutuhan alat kesehatan yang ada di Puskesmas Siompu menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Perencanaan sangat penting diperhatikan karena dengan perencanaan yang baik maka penggunaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu dapat terorganisir dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Data yang diambil di Puskesmas Siompu dari laporan tahunan Puskesmas Siompu terdapat 19,6 % pasien yang di rujuk ke Rumah sakit atau puskesmas lain. Hal ini disebabkan karena peralatan yang kurang menunjang pelayanan di Puskesmas Siompu.

Berdasarkan hasil obsevasi awal dan wawancara dengan kepala Puskesmas Siompu bahwa pengadaan alat kesehatan belum terealisasi dengan baik, khususnya peralatan di laboratorium, peralatan di rawat inap dan peralatan dental, sehingga pelayanan kesehatan sering sekali terbengkalai karena pengadaan alat kesehatan yang belum cukup memadai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu Kabupaten Buton Selatan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, biaya/dana, metode dan jumlah permintaan? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendapat informasi lebih mendalam tentang gambaran perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu Kabupaten Buton Selatan tahun 2015.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan

menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang perencanaan pengadaan alat kesehatan³. Objek penelitian ini adalah laporan atau data perencanaan alat kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas Siompu Kabupaten Buton Selatan tahun 2015.

HASIL

A. Sumber Daya Manusia

1. Kebutuhan staf/pegawai

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan staf/pegawai bagian perencanaan alat kesehatan di puskesmas Siompu belum ada. Hasil observasi dan telaah dokumen mengenai sumber daya manusia khususnya kebutuhan staf bagian perencanaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu belum ada.

2. Pengetahuan dan kemampuan pegawai

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan bahwa pernah dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai di Puskesmas dengan mengikuti pelatihan di luar daerah. Ada beberapa pelatihan yang diikuti oleh pegawai di Puskesmas dan hasilnya cukup memuaskan serta dapat meningkatkan pengetahuan dalam pengembangan kinerja, kemampuan, serta motivasi pegawai di Puskesmas Siompu.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggara Pelatihan di Bidang Kesehatan Bab 1 ayat (1) dinyatakan bahwa pelatihan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karier tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya⁴.

3. Teknik meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan pegawai

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan mengenai teknik meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan dalam penyusunan perencanaan pengadaan alat kesehatan dapat disimpulkan bahwa teknik meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan pegawai adalah dari pelatihan yang diikuti oleh pegawai dan

motivasi-motivasi serta dorongan yang diberikan kepada atasan atau sesama pegawai, namun tidak semua kedisiplinan dan tanggung jawabnya pegawai meningkat, karena masih ada juga pegawai yang acuh tak acuh terhadap pekerjaannya.

B. Sarana dan Prasarana

1. Kelengkapan sarana/fasilitas yang tersedia

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa kelengkapan sarana/fasilitas yang tersedia pada perencanaan pengadaan alat kesehatan telah cukup memadai dan dapat mendukung kelancaran tugas pegawai Puskesmas dalam menyusun perencanaan pengadaan alat kesehatan, karena kelengkapan sarana/fasilitas perencanaan di danai JKN, sehingga perencanaan pengadaan alat kesehatan mempunyai sarana/fasilitas khusus.

2. Sarana yang menunjang kegiatan perencanaan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan bahwa sarana/fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan perencanaan pengadaan alat kesehatan ada banyak sarana yaitu Laptop/computer, printer, ATK, meja, kursi dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumen mengenai sarana dan prasarana khususnya pada kelengkapan sarana/fasilitas yang tersedia cukup memadai dan dapat mendukung kelancaran tugas pegawai penyusun perencanaan serta beberapa macam sarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu.

C. Biaya/dana

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa biaya/dana yang dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan pada tahun 2015 sebesar 18.794.000,00. Dana JKN diambil 15% dari dana total yang masuk pertahun yang sesuai dengan juknis penggunaan dana.

Hasil observasi mengenai biaya/dana yang dipakai untuk pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu sebesar 18.794.000,00

yang diambil dari 15% dana yang masuk pada tahun tersebut.

D. Metode

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan tersebut mengenai metode yang digunakan dalam perencanaan dapat disimpulkan bahwa tidak ada pedoman/SOP dalam penyusunan perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas, mereka hanya berpedoman pada kebutuhan alat dan anggaran.

Penelusuran dokumen dan hasil observasi mengenai metode bahwa dalam penyesusnan perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu tidak mempunyai pedoman/SOP karena hanya berdasarakan kebutuhan alat.

E. Permintaan

Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa teknik untuk menentukan jumlah permintaan dari setiap bagian pemakai di puskesmas adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan dari setiap pemakai barang yang masih kurang dan sangat dibutuhkan dalam menunjang pelayanan kesehatan, kemudian disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada di Puskesmas Siompu.

Berdasarkan hasil observasi dan penelusuran dokumen mengenai permintaan alat kesehatan bahwa dalam menentukan jumlah permintaan harus disesuaikan dengan kebutuhan alat dan ketersediaan alat. Selain itu juga adanya laporan ketersediaan dan permintaan peralatan dari setiap bagian pemakai di Puskesmas Siompu. Pihak puskesmas melaporkan kondisi peralatan di Puskesmas dan kekurangannya ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan menggunakan format LT-3 yaitu laporan ketersediaan dan permintaan peralatan Puskesmas Siompu.

DISKUSI

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan (SDM Kesehatan) merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan. Pendidikan, dan pelatihan, serta

pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Sumber Daya Manusia dalam penelitian ini menyusun kebutuhan staf/pegawai di bagian perencanaan pengadaan alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan staf/pegawai pada saat proses perencanaan pengadaan alat kesehatan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf/pegawai dengan mengadakan pelatihan serta dengan teknik peningkatan tanggung jawab dan kedisiplinan dalam proses penyusunan perencanaan pengadaan alat kesehatan⁵.

1. Kebutuhan staf/pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah proses estimasi terhadap jumlah staf/pegawai berdasarkan kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab, serta kedisiplinan yang dibutuhkan untuk memberikan upaya kesehatan. Kebutuhan staf/pegawai dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, baik lokal, nasional, maupun global dan memantapkan keterkaitan dengan unsur lain dengan maksud untuk menjalankan tugas dan fungsi institusinya⁵.

Kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pengadaan alat kesehatan, sumber daya manusia di Puskesmas Siompu yang terlibat dalam penyusunan perencanaan adalah Kepala Puskesmas, KTU, bendahara JKN dan staf sub bagian di Puskesmas.

2. Pengetahuan dan kemampuan pegawai

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pegawai baik pengetahuan, kemampuan, keterampilan, bakat maupun mentalnya selain dapat ditempuh melalui kelanjutan pendidikan dapat pula ditempuh melalui pelatihan. Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan diluar sistem yang berlaku dalam kurun waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori⁶.

Dalam meningkatkan mutu pegawai baik dari segi pengetahuan keterampilan, maupun mentalnya pegawai perlu diberikan pelatihan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggara Pelatihan di Bidang Kesehatan ditekankan bahwa pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta kewenangan di bidang kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan adanya pelatihan yang baik dan terstruktur⁴.

3. Teknik meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan pegawai

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif Manajemen Sumber Daya Manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin dan tanggung jawab pegawai yang baik, sulit bagi organisasi Puskesmas untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan Puskesmas, pegawai, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap Kepala Puskesmas selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin dan tanggung jawab yang baik. Seorang Kepala Puskesmas dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika para bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab yang baik memang merupakan hal yang cukup sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhinya⁷.

Disiplin kerja dapat dikembangkan melalui suatu latihan dengan bekerja menghargai waktu, tenaga, biaya dalam perspektif manajemen. Peningkatan disiplin dan tanggungjawab berarti pola manajemen yang menanggapi pelanggaran pertama dalam memberikan tindakan minimal seperti peringatan lisan, tetapi untuk pelanggaran terus menerus dengan hukuman yang lebih berat, seperti pemberhentian sementara sampai pemecatan. Kenerja yang disiplin dan

tanggungjawab merupakan dua pilar utama yang harus dimiliki oleh semua pegawai, baik pada instansi pemerintah maupun swasta⁷.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

1. Kelengkapan sarana/fasilitas yang tersedia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN menyatakan bahwa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya⁸.

Berdasarkan PMK RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Juknis Penggunaan DAK bahwa penyediaan alat kesehatan dan sarana penunjang di Puskesmas yaitu: 1) Penyediaan peralatan kesehatan dalam mendukung UKM, 2) penyediaan peralatan kesehatan dalam mendukung UKP, dan 3) penyediaan sarana penunjang Puskesmas⁹.

2. Sarana yang menunjang kegiatan perencanaan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan menegaskan bahwa yang disebut sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan komprehensif, bagi Fasilitas Kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jejaring dengan sarana penunjang. Sarana penunjang wajib adalah sarana penunjang yang sering digunakan dalam proses perencanaan pengadaan alat kesehatan, karena sarannya dapat menunjang kegiatan sampai tuntas¹⁰.

Menurut Azwar (1996) salah satu aspek penting dalam perencanaan adalah tersedianya fasilitas, yaitu sarana dan prasarana yang dapat dipakai untuk kelancaran perencanaan tersebut. Dengan demikian

perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran kegiatan perencanaan alat kesehatan⁷.

C. Biaya/dana

Biaya/dana adalah semua pengeluaran yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.

Menurut PMK Nomor 84 Tahun 2014 tentang DAK menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna⁹.

Dalam alur proses perencanaan pengadaan barang, bagian keuangan dilibatkan dalam proses perencanaan pengadaan barang, mengingat perencanaan merupakan fungsi salah satu fungsi dari Kepala Puskesmas dan bagian keuangan maka perencanaan barang disesuaikan dengan anggaran yang ada.

D. Metode

Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu di dalam proses pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik/pendekatan secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi. Perencanaan dilakukan untuk menyusun rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Tujuan tersebut dapat mencakup tujuan umum (*goals*) dan tujuan khusus (*objectives*) suatu kegiatan/program. Metode perencanaan menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran perencana yang bersangkutan.

Perencanaan yang tidak didukung data, sering menimbulkan adanya rencana yang

tidak akan pernah tercapai, walaupun didukung oleh sumberdaya yang cukup memadai. Perencanaan memerlukan adanya data dasar yang diterima dan diakui oleh semua pihak termasuk disemua jenjang organisasi/lembaga terkait. Setiap ada perubahan harus dilakukan secara serentak, disemua tingkatan organisasi/ lembaga terkait. Data dasar harus diperbaiki setiap tahun perencanaan. Sering suatu rencana sudah disusun tanpa si perencana memahami apa yang ada dan sudah terjadi dan apa penghambat yang dihadapi. Dalam keadaan seperti ini, tujuan yang disusun dalam rencana tersebut hampir dapat dipastikan tidak akan dapat dicapai⁵.

E. Permintaan

Permintaan adalah jumlah barang/jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap factor yang mempengaruhinya konstan/tetap. Dalam permintaan ada teknik dalam menentukan jumlah permintaan dari setiap pemakai/konsumen yaitu Permintaan barang-barang bernilai prestise, harapan harga suatu barang akan berubah, hubungan kuantitas harga dan barang inferior serta faktor kebutuhan terhadap barang tersebut⁵.

Hasil penelitian Rini (2012) mengenai pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Merdeka Palembang Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan inventarisasi disetiap ruangan, setiap ruangan mengadakan permintaan barang pada petugas inventarisasi barang mengenai barang apa saja yang dibutuhkan melalui lokakarya mini¹¹.

SIMPULAN

1. Gambaran sumber daya manusia dalam penyusunan perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu yaitu kebutuhan staf/pegawai perencanaan belum ada, upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai dilakukan dengan mengikuti pelatihan, serta teknik peningkatan tanggung jawab dan kedisiplinan dilakukan dengan cara

- memotivasi staf/pegawai perencanaan Puskesmas.
2. Gambaran sarana dan prasarana dalam perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu yaitu kelengkapan sarana yang tersedia sudah cukup memadai dan mendukung kelancaran tugas serta sarana yang menunjang kegiatan yang menunjang adalah laptop/komputer, printer, meja, kursi, ATK dan lain-lain.
 3. Biaya/dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu tahun 2015 adalah ± 18 juta dari dana total JKN yang masuk diambil 15% pada tahun 2015.
 4. Metode mengenai penyusunan perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu tidak ada, pengadaan alat dilakukan berdasarkan kebutuhan alat di Puskesmas serta disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan pada tahun tersebut.
 5. Penentuan jumlah permintaan dari setiap bagian pemakai di Puskesmas Siompu adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan pemakaian alat, berdasarkan banyak alat yang habis atau rusak dan dibutuhkan berdasarkan anggaran yang tersedia.

SARAN

1. Diharapkan kepada Kepala Puskesmas Siompu hendaknya mengadakan pelatihan untuk bagian perencanaan khusus yang mengelola alat kesehatan agar perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas lebih baik lagi serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga perencanaan.
2. Diharapkan kepada Kepala Puskesmas Siompu agar perlu adanya standarisasi dan pedoman/SOP dalam pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan standar klasifikasi Puskesmas.
3. Penelitian ini masih perlu dikembangkan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Sondakh, G. 2015. Proses Perencanaan Pengadaan Kebutuhan Alat Kesehatan di Unit Kerja Poliklinik Gigi Rumah Sakit Angkatan Darat Robert Wolter Mangisidi Manado, *Skripsi*. Manado
3. Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggara Pelatihan di Bidang Kesehatan
5. Santi, D. 2013. Gambaran Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Kendari Tahun 2013, *Skripsi*. Kendari
6. Akbarini, D. 2012. Gambaran Pelaksanaan Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas Merdeka Palembang, *Skripsi*. Palembang
7. Pancaningrum, D. A. 2008. Gambaran Perencanaan Pengadaan Obat di Puskesmas. *Skripsi*.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2015
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
11. Rini, 2012. Pelaksanaan Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas Merdeka Palembang Tahun 2012, *Skripsi*. Palembang